

**GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA**

**FITRI NURJANAH
PAYAMTA
BANDI
JAKA WINARNA**



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA**

Penulis:

Fitri Nurjanah
Payamta
Bandi
Jaka Winarna

ISBN:

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Dalam dunia korporasi yang semakin kompleks dan dinamis, keberadaan sistem pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Di sinilah peran komite audit dan kualitas auditor menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh efektivitas komite audit terhadap manajemen laba riil serta bagaimana kualitas audit dapat memperkuat pengaruh tersebut. Melalui kajian ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara komite audit, kualitas audit, dan manajemen laba, serta implikasinya bagi praktik corporate governance.

Kesimpulan dari buku ini menunjukkan bahwa komite audit yang efektif berperan besar dalam menurunkan praktik manajemen laba, sekaligus menekankan pentingnya kualitas auditor dalam memperkuat pengawasan yang dilakukan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki komite audit dan auditor berkualitas dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi rekomendasi ini sangat bergantung pada komitmen manajemen dan dewan komisaris untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik terbaik dalam tata kelola. Kami berharap hasil buku ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi perusahaan dalam merumuskan

strategi pengawasan yang lebih baik serta membangun sistem tata kelola yang efektif dan efisien.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademis, praktisi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan tata kelola perusahaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 AGENSI DAN EFEKTIVITAS KOMITE	
AUDIT.....	11
A. Teori Agensi dan Mekanisme Governance.....	11
B. Peran Komite Audit dalam Mengurangi	
Masalah Agensi.....	15
BAB 3 MENGOPTIMALKAN EFEKTIVITAS	
KOMITE AUDIT MELALUI BUNDLE OF	
GOVERNANCE.....	17
A. Pendekatan Teori Agensi dalam Corporate	
Governance.....	17
B. Teori Bundle of Governance dan Mekanisme	
Monitoring.....	18
BAB 4 EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT DI BAWAH	
LINDUNGAN CORPORATE GOVERNANCE.....	20
A. Teori Agensi sebagai Landasan Corporate	
Governance yang Efektif.....	20
B. Mekanisme Corporate Governance dan	
Peran Auditor.....	21
BAB 5 EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT DAN	
IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN	
LABA RILL.....	26
A. Manajemen Laba dan Perannya dalam	
Laporan Keuangan.....	26
B. Efektivitas Komite Audit dalam	
Mengendalikan Manajemen Laba.....	27

BAB 6 MANAJEMEN LABA RILL DI BAWAH	
PENGAWASAN KOMITE AUDIT	30
A. Sales Manipulation	34
B. Overproduction.....	35
C. Discretionary Expenses	35
BAB 7 PERAN KUALITAS AUDIT DALAM	
MANAJEMEN LABA	37
A. Kualitas Audit dan Perannya dalam Laporan	
Keuangan	37
B. Efektivitas Komite Audit dalam Corporate	
Governance	39
BAB 8 INTERAKSI KUALITAS AUDIT DAN	
EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP	
MANAJEMEN LABA RILL	44
A. Peran Kualitas Audit dalam Moderasi	
Efektivitas Komite Audit	44
B. Komite Audit dan Kualitas Laporan	
Keuangan	45
BAB 9 PENUTUP.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

Manajemen laba merupakan isu yang masih menarik banyak perhatian para akademisi dan praktisi beberapa tahun terakhir. Munculnya fenomena manajemen laba di berbagai perusahaan BUMN maupun non-BUMN di Indonesia seperti PT kimia farma, PT indofarma, PT Katarina Utama, dan PT Inovisi Infracom. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 pada Garuda Indonesia pada saat dua komisaris Garuda menganggap laporan keuangan di tahun 2018 tidak sesuai dengan PSAK nomor 23. Proyek Garuda Indonesia yang rencananya akan diterima satu hingga lima belas tahun ke depan diakui sebagai pendapatan tahun 2018. Hal tersebut membuat kondisi laporan keuangan Garuda pada kuartal III-2018 yang masih menyatakan rugi bersih sebesar Rp 1,66 Triliun menjadi Rp 11,33 Miliar pada kuartal IV-2018. Hal tersebut mengakibatkan kedua komisaris Garuda Indonesia tidak bersedia menandatangani laporan keuangan.

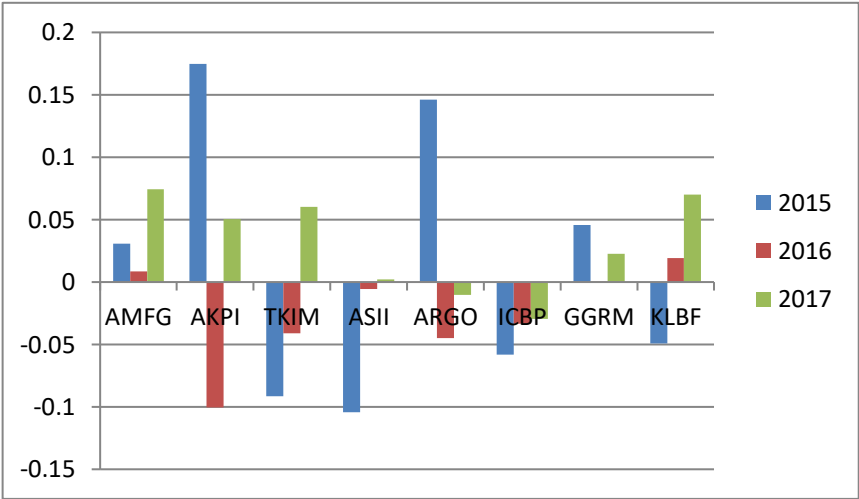
Manajemen Garuda mengakui bahwa pendapatan sebesar US\$ 239,94 juta didapat dari PT. Mahata Aero Teknologi dan bagi hasil yang didapat dari Sriwijaya Air sejumlah US\$ 28 juta. Dimana seharusnya jumlah tersebut masih dalam bentuk piutang, namun perusahaan sudah mengakuinya sebagai pendapatan. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kemenkeu memberikan sanksi kepada PT. Garuda Indonesia Tbk, seluruh direksi Garuda serta izin auditor Garuda yaitu KAP Kasner Sirumapea dibekukan

karena dinilai tidak mematuhi standar audit (Kumparan Bisnis, 2019). Contoh kasus yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia Tbk diketahui membawa isu manipulasi laporan keuangan yang berfokus kepada manajemen laba.

Praktik manajemen laba dilakukan ketika terjadinya asimetri informasi yang timbul dari *adverse selection* maupun *moral hazard* (Scott, 2012) . Asimetri informasi yang timbul dari moral hazard dapat mendorong manajemen berperilaku oportunistik sehingga dapat berdampak pada manajemen laba yang berefek negatif. Manajemen laba yang buruk merupakan manajemen laba yang menyembunyikan kinerja operasi sebenarnya melalui pembukuan palsu atau memperbesar estimasi laba sampai batas kewajaran (Parfet, 2000). Dampak negatif dari manajemen laba yaitu laba yang dilaporkan rendah, penurunan relevansi informasi akuntansi, penurunan kualitas laba mendatang, dan penurunan likuiditas saham. Motivasi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik adalah motivasi *bonus plan*, *debt plan*, dan *political cost* (Watts & Zimmerman, 1986).

Manajemen laba di Indonesia menjadi hal yang penting karena Indonesia berada dalam cluster negara-negara dalam perlindungan investor yang lemah, sehingga mempunyai praktik manajemen laba yang tinggi (Leuz *et al.*, 2003). Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar bursa efek Indonesia masih mengandung manajemen laba (Adiasih & Kusuma, 2012). Perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 82% melakukan praktik manajemen laba (Dwiadnyana & Jati, 2014). Lemahnya perlindungan hukum terhadap investor

kecil dan tingginya tingkat konsentrasi dan struktur kepemilikan keluarga menyebabkan investor kecil tidak mampu melindungi diri dari supremasi pemegang saham mayoritas (Lukviarman, 2001). Kondisi pasar modal semacam itu memberi peluang timbulnya asimetri informasi, jika timbul karena *modal hazard* maka dapat memicu praktik manajemen laba oportunistik (Scott, 2012).



Gambar 1. 1
**Grafik Discretionary Accrual Pada Perusahaan
 Manufaktur Tahun 2015-2017**

Sumber: Data diolah, 2022

Dari gambar 1.1 di atas menunjukkan secara menyeluruh bahwa sampel perusahaan manufaktur melakukan manajemen laba secara berturut-turut pada tahun kajian. Angka discretionary yang negatif berarti perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan

menurunkan nilai dari laba yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan. Sedangkan angka discretionary yang positif berarti perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan menaikkan nilai dari laba yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan.

Healy, (1985) menemukan Laba suatu periode akuntansi yang lebih tinggi dari target laba merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam periode tersebut dan mentransfer laba ke periode berikutnya. kajian (Neil *et al.*, 1995) mendapati bahwa sebagian perusahaan yang pertama kali *go public* mencoba menyusun laporan keuangan dengan agresif untuk mempengaruhi penerimaan kas dari penawaran perdana. Manajer perusahaan menggunakan angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi persepsi investor dalam penawaran perdana untuk perusahaan yang pertama kali *go publik*.

Terdapat dua praktik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba rill. Manajemen laba akrual dilakukan dengan menggunakan berbagai macam kebijakan maupun metode akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai tujuan laba (Braam *et al.*, 2015), sedangkan manajemen laba rill merupakan penyimpangan yang dilakukan manajemen dari kegiatan operasi normal perusahaan selama periode akuntansi untuk memenuhi target laba, menutupi kerugian atau analisis *forecast* (Roychowdhury, 2006) kajian sebelumnya mengenai manajemen laba lebih banyak berfokus pada manajemen laba akrual. Manajer lebih menyukai manajemen laba rill

dibandingkan dengan manajemen laba akrual (Graham *et al.*, 2005). penulisan (Cohen & Zarowin, 2010) menemukan bahwa perusahaan yang sebelumnya melakukan manajemen laba akrual untuk meningkatkan kinerja, maka akan berubah melakukan manajemen laba rill pada periode setelahnya. Beberapa penulis telah menyoroti manajemen laba rill di antaranya (Braam *et al.*, 2015; Chi *et al.*, 2011; Cohen & Zarowin, 2010; Roychowdhury, 2006)

Manajemen memanipulasi laba perusahaan yang membuat laporan keuangan menjadi bias, sehingga menyesatkan para pemangku kepentingan. Tindakan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara agen, yang dalam hal ini merupakan manajemen perusahaan dan principal yaitu *stakeholders*. Manajemen memiliki lebih banyak informasi daripada *stakeholders* yang akhirnya mengakibatkan timbulnya informasi asimetri sehingga manajemen cenderung melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya dibandingkan dengan kepentingan *stakeholders* sehingga terjadi *agency conflict* (Jensen & Meckling, 1976).

Konflik yang disebabkan oleh asimetri informasi dapat diminimalisir dengan melakukan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat membatasi terjadinya informasi asimetri, sehingga dapat menekan praktik manajemen laba perusahaan. Komite audit dalam kaitannya dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran untuk membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat dan pandangannya

mengenai masalah yang terjadi di perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, melakukan pengawasan atas pengendalian internal dan eksternal, serta proses pelaporan keuangan (Arun *et al.*, 2015; Bédard & Gendron, 2011; Sun *et al.*, 2011; Zalata *et al.*, 2018). Lebih lanjut komite audit mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kepentingan dan manajemen laba di perusahaan (Al-absy *et al.*, 2018).

Manajemen laba merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan ini harus dicegah, salah satu upaya pencegahannya adalah melalui pengawasan yang baik terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan dapat dilakukan secara eksternal oleh auditor eksternal dan secara internal oleh dewan komisaris dan komite audit. Menghadapi tindakan manajemen laba, di Indonesia, komite audit yang mendukung dewan komisaris dalam mengawasi informasi keuangan perusahaan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang dan Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, wajib memiliki minimal satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.

Menurut peraturan dari BAPEPAM nomor SE-03/PM/2002 komite audit terdiri dari tiga orang yang diketuai oleh dewan komisaris independen dan dua anggota lainnya memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi. Dalam pelaksanaan tugasnya komite audit membantu dewan komisaris untuk meningkatkan laporan keuangan perusahaan, mengurangi terjadinya

penyimpangan dalam tata kelola perusahaan, dan meningkatkan efektivitas internal audit dan eksternal audit.

Peraturan badan pengawas pasar modal No.IX.I.5 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit kep-29/PM/2004 komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite audit dikatakan independen apabila bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan publik kajian oleh Badolato *et al* (2014); Bédard *et al* (2004); Berger *et al* (2017); Gendron & Bédard (2006); Moroney & Trotman (2016); Nelson & Devi(2013); Zalata *et al* (2018) menyatakan bahwa komite audit yang efektif berpengaruh secara negatif terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit dianggap mampu memantau pengendalian internal (Badolato *et al.*, 2014; Carcello *et al.*, 2006; Carcello & Nagy, 2004; Choi, 2004; Kurniasih *et al.*, 2021), hal tersebut dikarenakan basis pengetahuan yang dimiliki sehingga mereka dapat meningkatkan kegiatan pemantauan sehingga menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang baik, dimana hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi praktik manajemen laba perusahaan. Di sisi lain terdapat kajian yang menghasilkan hal yang berlawanan, beberapa kajian tidak berada di bawah peraturan yang ditetapkan

dimana keahlian keuangan berhubungan positif dengan manajemen laba karena keahlian ini dianggap mampu memahami celah dalam pelaporan keuangan dalam membantu manajemen dalam melakukan manajemen laba (Dhaliwal *et al.*, 2010; Sun *et al.*, 2014).

Berkembangnya peraturan yang menjelaskan komite audit beserta fungsinya dengan lebih detail akan berdampak kepada proses audit di lingkungan perusahaan baik itu audit internal maupun eksternal. Sesuai fungsi dan tujuan dibentuknya komite audit, proses pengawasan laporan keuangan, pemilihan auditor serta biaya audit yang dikeluarkan akan bergantung kepada kualitas komite audit yang dimiliki perusahaan (Rainsbury *et al.*, 2009).

Hubungan antara kualitas komite audit dengan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan dapat diperkuat dengan audit yang berkualitas oleh auditor eksternal. Komite audit dalam perusahaan dianggap sebagai mekanisme pemantauan yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan untuk pengawasan proses pelaporan keuangan perusahaan (Joshi & Wakil, 2004). Komite audit dalam menjalankan fungsi membantu dewan komisaris dalam menjaga kualitas laporan keuangan akan semakin baik dengan adanya auditor yang memiliki kualitas yang tinggi. Komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat menjadi penengah yang baik apabila ada perselisihan antara auditor dan perusahaan (Zgarni *et al.*, 2016). Sisi eksternal perusahaan terdapat auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang kompeten dan independen bertugas untuk menilai

seberapa besar laporan keuangan perusahaan. Komite audit mewakili dewan komisaris untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit.

Al-Thuneibat *et al.* (2016) mengkaji tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba yang menggunakan manajemen laba akrual. Imen & Anis, (2021) mengkaji pelaporan audit terhadap manajemen laba dimodeasi oleh kualitas audit. Qamhan *et al.*, (2018) menguji karakteristik baru komite audit kehadiran anggota komite audit pada rapat dan perubahan anggota terhadap manajemen laba akrual. kajian ini menguji efektivitas komite audit terhadap manajemen laba rill dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. kajian ini menekankan pada interaksi dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. pengawasan di sisi internal yaitu komite audit dengan penilai laporan keuangan dari sisi eksternal yaitu auditor eksternal. penulis menggabungkan proksi eektivitas komite audit yang dikembangkan dari beberapa kajian terdahulu yang menggunakan pengukuran komite audit (Abbott & Parker, 2000; Bliss *et al.*, 2011; Goodwin dan Kent, 2006; Vafeas & Waegelein, 2007; Zaman *et al.*, 2011). Pengukuran tersebut digabungkan menjadi skor pengukuran yang terdiri dari independensi komite audit, keahlian komite audit, ketekunan komite audit, ukuran komite audit dan ketua komite audit dengan keahlian akuntansi kajian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia, penggunaan perusahaan manufaktur dikarenakan industri manufaktur berperan penting dalam upaya untuk peningkatan nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi

sektor andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya (Abdullah & Ismail, 2016; Al-Thuneibat et al., 2016; Imen & Anis, 2021; Nasution & Jonnergard, 2017; Qamhan et al., 2018; Wan Mohammad & Wasiuzzaman, 2020; Zgarni et al., 2016) adalah menjadikan kualitas audit menjadi variabel pemoderasi untuk memperkuat monitoring komite audit terhadap manajemen laba, interaksi dua mekanisme pengawasan internal dan eksternal bersifat komplementer yaitu saling melengkapi dalam fungsi *corporate governance*.

BAB 2

AGENSI DAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT

A. Teori Agensi dan Mekanisme Governance

Teori agensi pada awalnya dikembangkan dalam kajian Mizruchi (2004) yang membahas pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Jensen & Meckling (1976) mengembangkan *agency theory* yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih prinsipal yang menyewa agen untuk melakukan beberapa jasa atas nama orang lain yaitu pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen.

Menurut Jensen (1983), teori agensi yang akhirnya dibidang ekonomi informasi telah dikembangkan dalam dua jalur: positif dan principal-agen. Dua aliran tersebut masuk kedalam unit analisis umum yakni kontrak antara prinsipal dan agen. Dalam perspektif teori agen positif, aliran positif sangat perhatian terhadap diskripsi mekanisme *governance* yang memecahkan masalah keagenan. penulis positif fokus pada identifikasi situasi yang prinsipal dan agen cenderung memiliki konflik kepentingan dan kemudian menjelaskan mekanisme *governance* yang membatasi perilaku agen dalam hal memetingkan diri sendiri (Clarke, 2008:80).

Menurut Clarke (2008), model keagenan yang menggunakan teori agensi positif memiliki dua proporsi terkait mekanisme *governance*. Proporsi pertama, kontrak yang didasarkan pada *outcome* efektif dalam membatasi oportunitisme agen. Argumentasinya adalah kontrak tersebut menyelaraskan preferensi agen dengan prinsipal karena bisnis untuk keduanya bergantung pada tindakan yang sama. Oleh karena itu, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dikurangi melalui mekanisme ini. Proporsi kedua, sistem informasi akan membatasi oportunitisme agen. Argumentasinya adalah sistem informasi menginformasikan kepada prinsipal tentang apa yang dilakukan oleh agen, sistem informasi dapat membatasi oportunitisme agen menyadari ia tidak menipu prinsipal.

Teori keagenan berisi tentang penjelasan antara pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen yang mempunyai kepentingan bertentangan antara satu dengan yang lain. Hubungan *agency* muncul saat pihak *principal* dalam hal ini adalah *stakeholders* memberikan wewenang kepada pihak agen dalam hal ini yaitu manajemen perusahaan untuk secara penuh membuat keputusan yang berdampak terhadap perusahaan. terjadi pertentangan apabila pihak manajemen tidak bertindak sesuai dengan perintah dari *stakeholders*, sehingga keputusan yang diambil hanya menguntungkan pihak manajemen (Jensen & Meckling, 1976).

Konsep pemisahan dan kontrol (*separation of ownership and control*) membawa konsekuensi

timbulnya masalah agensi antara prinsipal dan agen. Masalah agensi timbul dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai pelaksana operasional perusahaan. Prinsipal lebih berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan agen berorientasi pada peningkatan nilai jangka pendek sesuai kontrak dengan manajemen. Bentuk konflik bisa berupa penetapan kompensasi dan pemakaian fasilitas perusahaan yang berlebihan oleh manajemen maupun bentuk manfaat lainnya yang menguntungkan manajemen yang dibebankan ke perusahaan.

Konflik antara pemegang saham dan manajemen inilah yang sering disebut atau agency problem tipe 1. Asumsi yang mendasari agency problem tipe 1 adalah kepemilikan saham menyebar (widespread ownership). Pemegang saham jumlahnya banyak dan tersebar namun secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan. Pemegang saham yang tersebar tersebut secara bersama-sama mendelegasikan hak pengendalian atas perusahaan kepada pihak lain (manajemen) yang mempunyai kemampuan menjalankan perusahaan. Konsep agensi ini dikembangkan dari model Anglo-Saxon yang dianut oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris.

Agency problem tipe 1 bisa timbul dari adverse selection atau moral hazard (Eisenhardt, 1989). Dalam hal ini agen tidak melakukan aktivitas yang mengoptimalkan kesejahteraan prinsipal (Eisenhardt,

1989). Manajer memiliki kontrol terhadap operasional perusahaan, sehingga manajer secara oportunistik dapat memanfaatkan asimetri informasi yang ada untuk melakukan apropriasi keuntungan perusahaan demi kepentingan pribadi. Pemegang saham yang tersebar luas tidak memiliki kemampuan untuk memantau dan mengendalikan aktivitas oportunistik manajer secara sempurna.

Menurut Eisenhardt (1989), terdapat tiga sifat dasar manusia, yaitu self interest, bounded rationality, dan risk averse yang mendasari perilaku oportunistik manajer sehingga mendorong timbulnya konflik keagenan. Perilaku oportunistik manajer tampak pada kecenderungan tindakannya berorientasi untuk memenuhi kepentingan diri sendiri (self interest) dibanding upaya meningkatnya nilai perusahaan. Masalah keagenan akan selalu muncul jika terdapat konflik kepentingan didalam perusahaan yakni adanya ketidakseimbangan "kekuatan" antara pihak yang berhubungan. Konflik kepentingan secara psikologis didasarkan pada asumsi bahwa sifat manusia bersifat oportunistik, yaitu memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi tertentu yang dapat merugikan pihak lain (Williamson, 1985). Perilaku oportunistik manajer seperti ini menimbulkan masalah keagenan yang memicu biaya keagenan. Prinsipal menanggung biaya keadaan, seperti monitoring cost, bonding cost, dan residual loss, terutama pada perusahaan yang memiliki mekanisme corporate

governance yang kurang efektif. Biaya yang ditimbulkan oleh konflik antara prinsipal dan agen merupakan akar permasalahan agency problem tipe 1 (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976).

B. Peran Komite Audit dalam Mengurangi Masalah Agensi

Pemberian otoritas kepada agen menimbulkan masalah tersendiri dikarenakan agen akan menggunakan hal tersebut untuk memaksimalkan utilitas pribadi dan dapat merugikan prinsipal. Untuk mengurangi biaya agensi, prinsipal akan dikenakan biaya pemantauan. Menurut teori agensi, pengeluaran pemantauan memungkinkan *principal* untuk mengamati tindakan agen dengan lebih baik, biaya pemantauan ini termasuk biaya perekrutan anggota dewan yang kemudian akan membentuk subkomite seperti komite audit.

Masalah keagenan dapat diminimalisir dengan kehadiran komite audit yang memiliki peran penting untuk mengawasi, memonitoring dan memberikan pendapat tentang kinerja manajemen perusahaan dalam melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kepentingan dan manajemen laba di dalam perusahaan (Al-absy *et al.*, 2018). Teori agensi menjelaskan tentang manfaat dari komite audit dalam perusahaan, dimana mereka dapat menjadi alat untuk memitigasi biaya agensi seerta sebagai dewan pengawas dalam hal ini membantu dewan komisaris,

sehingga meningkatkan control internal perusahaan dan memperbaiki hubungan agensi antar perusahaan (Salehi *et al.*, 2018).

Adanya diversitas dalam keanggotaan komite audit mempengaruhi pembentukan komite audit yang efektif. Sebagai contoh kajian Gore, Matsunaga, & Eric Yeung (2010) menyatakan bahwa insentif untuk memantau adalah penting, pemantauan yang efektif membutuhkan tingkat pengetahuan khusus yang tinggi untuk mengevaluasi keputusan manajerial. Tanpa pelatihan dan pengalaman keuangan yang memadai, bahkan direktur yang termotivasi tidak dapat menentukan apakah kebijakan keuangan perusahaan sesuai.

BAB 3

MENGOPTIMALKAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT MELALUI BUNDLE OF GOVERNANCE

A. Pendekatan Teori Agensi dalam Corporate Governance

Kajian empiris tentang *corporate governance* sebagian besar berakar dari teori agensi dengan asumsi mengelola permasalahan agensi, maka perusahaan akan beroperasi lebih efisien dan kinerja lebih baik. Hasil kajian empiris secara umum menemukan hubungan praktek *corporate governance* dan kinerja perusahaan meragukan beberapa premis kajian keagenan dan menyarankan melakukan re-orientasi kerangka kerja *corporate governance* (Aguilera et al., 2012).

Aguilera et al. (2012) mengungkapkan beberapa kajian berusaha mengembangkan pendekatan konfigurasi terhadap *corporate governance* dengan identifikasi yang berbeda. Kajian tersebut konsisten menghubungkan internal perusahaan dengan lingkungannya, bukan satu set hubungan universal yang berlaku bagi semua organisasi. Kajian bertujuan mengeksplorasi mekanisme *corporate governance* berinteraksi dan saling menggantikan (substitusi) atau saling melengkapi (komplementer) satu sama lain dalam praktek *bundle of governance*. Konsep komplementer memberikan merikan dasar untuk

memahami bagaimana berbagai elemen strategi, struktur, dan proses sebuah organisasi saling terkait.

B. Teori Bundle of Governance dan Mekanisme Monitoring

Teori *bundle of governance* pada awalnya diperkenalkan oleh (Rediker & Seth, 1995) telah menarik beberapa perhatian penulis ilmiah. Teori ini mengacu pada kombinasi beberapa mekanisme *corporate governance* yang saling berinteraksi, yang mana satu sama lain berfungsi melengkapi (komplementer) atau menggantikan (substitusi) dalam sebuah *bundle* (paket) praktek *governance* (Aguilera et al., 2012; Rediker & Seth, 1995; Ward et al., 2009) kajian ini menempatkan dewan sebagai bagian utama dari mekanisme *bundle of governance* yang fokus dalam fungsi komplementer antara mekanisme *governance*.

Teori *bundle of governance* pada kajian ini memberikan dasar argumentasi untuk menjelaskan mekanisme internal dan eksternal *governance* dalam monitoring manajemen laba. Mekanisme internal dijalankan oleh Dewan Komisaris yang menunjuk komite audit untuk menjalankan fungsi pengawasannya, sementara mekanisme *governance* eksternal dijalankan oleh auditor eksternal. Dua mekanisme *governance* ini saling berinteraksi dan diprediksi dapat meningkatkan efektivitas mekanisme monitoring terhadap manajemen laba.

Teori *bundle of governance* pada penelitian ini memberikan dasar argumentasi untuk menjelaskan

mekanisme internal dan eksternal governance dalam monitoring manajemen laba. Mekanisme internal dijalankan oleh dewan komisaris yang menunjuk komite audit untuk menjalankan fungsi pengawasannya, sementara mekanisme governance eksternal dijalankan oleh auditor eksternal dan tekanan media. Dua mekanisme governance ini saling berinteraksi dan diprediksi dapat meningkatkan efektivitas mekanisme monitoring terhadap manajemen laba. Interaksi dua mekanisme governance ini dapat saling menggantikan maupun saling melengkapi. Dalam fungsi komplementer, mekanisme eksternal governance dapat menguatkan pengaruh monitoring internal terhadap manajemen laba.

Penerapan fungsi komplementer, operasi simultan dari beberapa mekanisme corporate governance penting dalam membatasi perilaku oportunistik manajerial. Satu mekanisme corporate governance tidak cukup efektif tanpa pelengkap mekanisme lain, seperti pengungkapan informasi berkualitas untuk investor yang memungkinkan pasar menilai harga saham secara akurat, dan system audit yang ketat untuk menjamin kualitas informasi yang diungkapkan (Aguilera et al., 2012).

BAB 4

EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT DI BAWAH LINDUNGAN CORPORATE GOVERNANCE

A. Teori Agensi sebagai Landasan Corporate Governance yang Efektif

Corporate governance merupakan konsep yang bisa didekati oleh berbagai macam teori, salah satu adalah teori agensi. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan mendapatkan *return* atas dana yang telah diinvestasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan atas investasinya. Investor meyakini bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi investor.

Pada konteks keagenan, *corporate governance* dapat menurunkan *monitoring cost* karena adanya peningkatan pengawasan dan transparansi atau penurunan asimetri informasi (Watts & Zimmerman, 1986). Mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol *monitoring cost* adalah penerapan *corporate governance* yang baik. Mekanisme ini dapat menjamin bahwa prinsipal akan menerima hasil investasinya sesuai yang telah dilakukan (Shleifer & Vishny, 1997).

B. Mekanisme Corporate Governance dan Peran Auditor

Denis & McConnell (2003) membedakan mekanisme *corporate governance* menjadi dua bagian internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh Dewan Komisaris yang dibantu oleh komite audit. Mekanisme eksternal lebih kepada pengawasan oleh pasar dan sistem hukum yang berlaku. Mekanisme eksternal yang berlaku di Indonesia dijalankan oleh auditor eksternal.

Proses audit merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang penting yakni menyediakan penjamin bagi *stakeholder* melalui monitoring proses pelaporan keuangan. Auditor berfungsi sebagai monitoring eksternal pada proses laporan keuangan perusahaan. Auditor yang berkualitas dapat membatasi manajemen laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Balsam et al., 2003; Zhou & Elder, 2004).

Peran dewan komisaris yang dibantu oleh komite audit dalam fungsi untuk melakukan monitoring laporan keuangan, diharapkan mampu mengontrol perilaku oportunistik manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Peran auditor menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan mengikuti standart akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini peran auditor lebih pada penguatan fungsi *monitoring* internal yang dilakukan oleh dewan komisaris yang dibantu komite audit.

Kajian ini menurunkan variabel *corporate governance* ke dalam struktur dan mekanisme *corporate governance*. Struktur *corporate governance* terdiri dari Dewan Komisaris yang diantungi oleh komite-komite, salah satu komite yang terkait dengan pelaporan keuangan adalah komite audit. Mekanisme *corporate governance* meliputi aktivitas *monitoring* yang dilakukan, yaitu erupa serangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktik (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN (Zhuang et al., 2000). Laporan ADB (Asian Development Bank) 2000 menunjukkan fenomena terjadi di Indonesia antara lain belum melakukan pengelolaan Perusahaan secara profesional, karena konsentrasi kepemilikan memungkinkan terjadinya afiliasi antar pemilik, pengawas dan pengelola Perusahaan, serta tidak berfungsinya Dewan Komisaris.

Kelemahan pada praktik *corporate governance*, seperti pengawasan dewan komisaris tidak efektif, inefisiensi dan prosedur pengawasan kurang transparan, ketergantungan terhadap dana eksternal dan pengawasan kreditur tidak memadai (Daniri, 2005). Pengembalian kepercayaan terhadap perekonomian di Indonesia, pemerintah sepakat menerima bantuan dari IMF (International Monetary Fund) dengan peningkatan *corporate governance*

sebagai persyaratan yang tercantum dalam Letter of Intent. Beberapa kebijakan dalam reformasi corporate governance yakni pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), penerapan strategi reformasi corporate governance, amandemen undang-undang perseroan, peningkatan akuntabilitas dan disclosure, dan peningkatan penguasaan dan menegakan hukum (IMF, 2000).

Pada Tingkat kebijakan nasional, pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tanggal 30 November 2000 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP-31/M.EKUIIN/06/2000 dengan tujuan meningkatkan penerapan corporate governance di Indonesia, memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal-hal yang terkait dengan isu governance di sektor publik maupun privat. KNKG memiliki program yang merupakan pelengkap dan pendukung program yang dimiliki oleh Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI), antara lain penyusunan pedoman good corporate governance. Pemerintah Indonesia memperluas tugas Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI tentang pembentukan KNKG, sehingga memperluas cakupan tugas sosialisasi Governance bukan hanya di sektor korporasi tapi juga di sektor pelayanan publik.

KNKG merupakan Lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan good corporate governance di Indonesia secara komperhesif dan

memberikan masukan pada pemerintah tentang isu governance di sektor publik. KNKG memiliki visi mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan governance terbaik di dunia dan memiliki misi mendorong serta meningkatkan efektifitas penerapan good corporate di Indonesia dalam rangka membantu kultur yang berwawasan good corporate di sektor publik dan korporasi.

Sejak 2010 hingga sekarang, Good Corporate Governance (GCG) Indonesia menunjukkan peningkatan dalam regulasi, implementasi, dan pengawasan. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Tahun 2011, yang diterbitkan pada tahun 2011, menandai kemajuan besar dalam pengembangan GCG di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan semua BUMN untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas BUMN, yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia (Wahyudin & Solikhah, 2017).

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pasar modal Indonesia. Peraturan ini mendorong perusahaan publik untuk mematuhi standar GCG dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Di tahun 2015, peraturan GCG untuk BUMN diperbarui, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana BUMN harus

menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam operasi sehari-hari mereka.

Untuk meningkatkan penerapan GCG di pasar modal Indonesia, OJK meluncurkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan, yang mencakup strategi untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya GCG, dan memastikan bahwa perusahaan publik mematuhi standar GCG yang ketat (Tjahjadi et al., 2021). Pada tahun 2021 OJK membuat Peraturan Nomor 17/POJK.03/2021 yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam konglomerasi keuangan dan memastikan bahwa semua entitas mematuhi standar GCG. Peraturan ini merupakan langkah penting untuk mengatasi kompleksitas tata kelola yang ada di banyak konglomerasi keuangan yang berbeda.

Pedoman dan peraturan GCG terus diperbarui, pemerintah dan OJK bekerja sama untuk menyesuaikan regulasi dengan standar internasional dan praktik terbaik global. Peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi adalah fokus utama untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip GCG.

BAB 5

EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN LABA RILL

A. Manajemen Laba dan Perannya dalam Laporan Keuangan

Laba dianggap sebagai elemen yang paling penting dalam suatu laporan keuangan. Laba yang dihasilkan bisa menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Tujuan laporan keuangan sesuai yang di nyatakan oleh PSAK yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Investor memiliki ketergantungan terhadap suatu informasi dalam laporan keuangan. Hal tersebut bisa memberikan dorongan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan menarik investor yang potensial atau mempertahankan investor saat ini.

Manajemen laba merupakan suatu pemilihan kebijakan akuntansi atau aktivitas nyata yang mempengaruhi laba agar besarnya sesuai dengan keinginan manajemen (Scott, 2012). Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyetatkan pihak yang berkepentingan

mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy & Wahlen, 1999).

B. Efektivitas Komite Audit dalam Mengendalikan Manajemen Laba

Asumsi pertama menyatakan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba rill. Hasil uji statistik menyatakan bahwa asumsi pertama diterima yang artinya bahwa variabel efektivitas komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba rill. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang efektif dalam menjalankan segala tugas dan wewenangnya, memiliki anggota yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi, dan mengikuti rapat yang telah dijadwalkan dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba dalam perusahaan.

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik yang memiliki komite audit yang efektif dapat menurunkan manajemen laba dalam perusahaan (Badolato et al., 2014; Carcello et al., 2006; Carcello & Nagy, 2004; Choi, 2004; Kurniasih et al., 2021). Efektivitas komite audit yang tertata dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Safari, 2017) dan mengurangi salah saji pada laporan keuangan melalui. Pengendalian internal dalam perusahaan dilakukan oleh dewan komisaris

yang dibantu oleh komite audit yang memiliki fungsi pengawasan yang dapat menurunkan resiko yang dimiliki perusahaan.

Masalah agensi yang dihadapi perusahaan adalah konflik antara agen dan principal. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyelaraskan konflik yang dihadapi oleh prinsipal dan agen melalui pengelolaan perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan adalah salah satu untuk mengendalikan oportunistik yang dapat dilakukan oleh manajemen (Veronica & Bacthiar, 2005). Salah satu mekanisme tata kelola yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik agensi yakni komite audit.

Healy, (1985) Struktur tata kelola perusahaan di Indonesia, posisi dewan komisaris adalah manajer tertinggi perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan. Untuk membantu menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite di bawahnya, contohnya komite audit. Komite audit memegang peran penting dalam menciptakan *good corporate governance* pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan baik apabila *good corporate governance* sesuai dengan *standart OECD yang berlaku di Indonesia*.

Efektivitas komite audit yang tertata dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Safari, 2017) dan mengurangi salah saji pada laporan keuangan melalui fungsi pengawasan. Komite audit memainkan peran penting dalam mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan.

Komite audit secara aktif mengawasi dan memantau manajemen yang mempersiapkan laporan keuangan (Qamhan *et al.*, 2018). Komite audit yang efektif dapat mengakhibatkan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer bisa diminimalisir dikarenakan apabila komite audit efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat menurunkan manajemen laba.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membantu ikatan komite audit Indonesia dalam menyusun konsep strategis dan implementasi *good corporate governance* yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawab dewan komisaris dan komite audit.

BAB 6

MANAJEMEN LABA RILL DI BAWAH PENGAWASAN KOMITE AUDIT

Laba dianggap sebagai elemen yang paling penting dalam suatu laporan keuangan. Laba yang dihasilkan bisa menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Tujuan laporan keuangan sesuai yang di nyatakan oleh PSAK yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Investor memiliki ketergantungan terhadap suatu informasi dalam laporan keuangan. Hal tersebut bisa memberikan dorongan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan menarik investor yang potensial atau mempertahankan investor saat ini.

Manajemen laba merupakan suatu pemilihan kebijakan akuntansi atau aktivitas nyata yang mempengaruhi laba agar besarnya sesuai dengan keinginan manajemen (Scott, 2012). Barth & Schipper (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan pihak yang berkepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy & Wahlen, 1999).

Manajemen laba menurut Noronha et al. (2008) adalah suatu rangkaian kesatuan dari intervensi yang sengaja dalam proses pelaporan keuangan yang benar ke arah pelanggaran aturan GAAP, dengan niat untuk menyesatkan stakeholder mengenai kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan. Sevin & Schroeder (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai usaha dari manajemen perusahaan untuk mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan pada jangka pendek, sementara Gakhar (2014) menyatakan bahwa manajemen laba adalah istilah dibidang praktik akuntansi yang mungkin mengikuti standart akuntansi yang mungkin mengikuti aturan standart akuntansi yang berlaku tetapi menyimpang dari tujuan aturan tersebut.

Manajemen laba dibedakan menjadi dua yaitu manajemen laba riil dan manajemen laba akrual. Manajemen dapat menggunakan kedua jenis manajemen laba tersebut secara bersama-sama atau juga saling menggantikan. Cohen & Zarowin (2010) menemukan perilaku manajer untuk mengubah manajemen laba akrual ke manajemen laba riil setelah adanya Sarbanes-Oxly Act (SOX). Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zang (2012) yang menguji manajemen laba riil dan akrual pada perusahaan di Yunani sebelum dan sesudah pengadopsian International Financial Reporting Standart (IFRS). Hasilnya terbukti bahwa perusahaan melakukan pergantian dari manajemen laba akrual ke manajemen laba riil setelah adopsi IFRS.

Praktik manajemen laba yang lazim dilakukan manajemen dengan cara manipulasi akrual murni (*pure*

accrual). Metode akrual murni disebut juga dengan manipulasi akrual (*discretionary accrual*), dimana tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap arus kas (Roychowdhury, 2003). Manajemen akrual dilakukan pada akhir periode akuntansi dimana manajer mengetahui laba sebelum dimanipulasi sehingga dapat mengetahui seberapa besar laba yang harus dimanipulasi agar target laba yang sudah ditetapkan sebelumnya juga tercapai, menurut Okrorina & Hutagaol (2009) manipulasi dengan cara ini dibatasi oleh PABU (Prinsip akuntansi berterima umum).

Manajemen laba dengan manipulasi rill adalah manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan laba dengan membuat keputusan yang berhubungan langsung dengan aktivitas operasi perusahaan sehingga dapat memiliki dampak secara langsung terhadap arus kas perusahaan. Menurut Cohen & Zarowin (2010) manajemen laba akrual tidak memiliki konsekuensi langsung pada arus kas perusahaan, sementara manajemen laba melalui aktivitas rill memiliki konsekuensi langsung pada aktivitas perusahaan. Manajemen laba rill dilakukan dengan tindakan nyata yang menyimpang dari praktik bisnis secara normal, tindakan ini termotivasi atas keinginan manajer untuk menyesatkan pemangku kepentingan sehingga mereka percaya bahwa pelaporan keuangan telah terpenuhi dalam keadaan bisnis normal (Roychowdhury, 2006).

Aktivitas manipulasi rill tidak menarik perhatian auditor atau keajiban hukum karena manajer tidak menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan dan

secara sengaja memanipulasi angka akuntansi. Manajemen laba rill sulit terdeteksi dan tidak menjadi perhatian auditor karena tindakan nyata yang dilakukan oleh manajemen adalah manipulasi kegiatan operasi yang sepenuhnya dikuasai oleh manajemen, sedangkan fokus regulasi dan auditor hanya pada aktivitas akrual.

Tindakan manajemen laba aktivitas rill ukan yang tanpa resiko. Tindakan ini secara potensial akan menimbulkan biaya jangka panjang yang lebih besar terhadap *stakeholder* dibandingkan manajemen laba akrual karena manajemen laba aktivitas rill memiliki konsekuensi negati terhadap arus kas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Roychowdhury, 2006). Biaya jangka panjang tersebut di antaranya disebabkan oleh *temporary price discount* atau ketentuan kredit yang lebih lunak yang akan menyebabkan margin melemah pada penjualan jangka panjang (Roychowdhury, 2006). Berdasarkan kajian (Roychowdhury, 2006) manajemen laba melalui aktivitas rill dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu *sales manipulation, overproduction* dan *discretionary expense*.

A. Sales Manipulation

Sales manipulation merupakan usaha manajer dalam periode waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan dalam satu tahun dengan menawarkan potongan harga atau perjanjian hutang yang lebih lunak (Roychowdhury, 2006). Manajer melakukan hal tersebut untuk meningkatkan volume penjualan sementara waktu, namun volume penjualan akan kembali normal ketika perusahaan kembali pada tingkat harga yang lama. Volume penjualan pada periode perusahaan melakukan manipulasi penjualan akan meningkat, namun disisi lain arus kas yang dilaporkan akan menjadi lebih rendah. Dari sisi arus kas, teknik ini menyebabkan arus kas kegiatan operasi pada periode berjalan lebih rendah dibandingkan level penjualan normal. Hal inilah yang menyebabkan munculnya *abnormal cash flow operation*, sehingga tingkat manajemen laba melalui aktivitas riil yang tinggi ditunjukkan dengan tingkat *abnormal cash flow operation* yang lebih rendah.

Cutting sales prices dan memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak dapat mempercepat penjualan dan membantu memenuhi target penjualan tahun berjalan. Volume penjualan yang tinggi dari potongan harga tidak selalu menghasilkan arus kas operasi yang tinggi karena arus kas masuk per penjualan cenderung lebih rendah dari penjualan normal. Arus kas operasi normal dirumuskan sebagai fungsi linier dari penjualan dan perubahan penjualan pada periode yang sama (Roychowdhury, 2006).

B. Overproduction

Overproduction merupakan usaha menajer untuk meningkatkan penerimaan dengan memproduksi barang dalam jumlah lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan sesuai ekspektasi (Roychowdhury, 2006), Hal ini menyebabkan biaya tetap per masing-masing unit menjadi lebih kecil sepanjang biaya tersebut tidak ditambah lagi oleh biaya marginal lain. Konsekuensi dari teknik ini adalah munculnya *production cost* dan *holding cost* dari produksi yang berlebihan sehingga arus kas menjadi lebih rendah dari pada tingkat penjualan pada kondisi normal. Kondisi tersebut dapat memunculkan *abnormal production*. Tindakan manajemen laba aktivitas riil dapat dilihat dari tingginya nilai *abnormal production*.

Memproduksi lebih banyak persediaan dari biasanya dapat mengurangi biaya *overhead* tetap yang mengarah pada harga pokok penjualan yang rendah dan margin keuntungan yang tinggi. Biaya produksi keseluruhan relatif terhadap penjualan cenderung meningkat karena persediaan tambahan. Biaya produksi dihitung sebagai jumlah harga pokok penjualan dan perubahan persediaan. Tingkat normal biaya produksi diperkirakan sebagai fungsi linier dari penjualan pada periode t , pertumbuhan persediaan pada periode t dan lag dari pertumbuhan persediaan (Roychowdhury, 2006).

C. Discretionary Expenses

Discretionary Expenses merupakan biaya kebijakan sebagai perilaku akuntansi dengan membebankan pengeluaran diskresioner sebagai perilaku akuntansi dengan membebankan pengeluaran diskresioner

seperti biaya kajian dan pengembangan, iklan, peratan, biaya umum, dan biaya administrasi dalam periode yang sama ketika terjadinya biaya (Roychowdhury, 2006). Kebijakan membebaskan pengeluaran diskresioner ini umumnya terjadi ketika biaya diskresioner tidak secara langsung menghasilkan penerimaan. Penerimaan biaya diskresioner akan menyebabkan penurunan aliran kas keluar sehingga memiliki dampak positif terhadap arus kas dari operasi *abnormal* pada periode sekarang namun menyebabkan resiko arus kas lebih rendah di periode selanjutnya. Kondisi tersebut dapat memunculkan adanya *abnormal discretionary expenses*. Tindakan manajemen laba riil dapat dilihat dari rendahnya *abnormal discretionary expenses*.

Manajemen laba riil diharapkan menghasilkan jumlah beban diskresioner yang lebih rendah dari biasanya. Mengukur tingkat abnormalitas dari beban diskresioner untuk mendeteksi manajemen laba riil dapat dilakukan secara individual untuk setiap beban tunggal atau alternatif dari jumlah seluruh beban diskresioner (Cohen et al., 2008; Osma, 2008). Tingkat normal biaya diskresioner dinyatakan sebagai fungsi linier dari penjualan yang tertinggal untuk menghindari abnormalitas yang sangat rendah dalam biaya diskresioner karena penjualan yang meningkat pada tahun berjalan (Roychowdhury, 2006).

BAB 7

PERAN KUALITAS AUDIT DALAM MANAJEMEN LABA

A. Kualitas Audit dan Perannya dalam Laporan Keuangan

Tujuan audit laporan keuangan adalah memastikan apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Arens et al., 2014a). Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham dapat mengambil keputusan berdasarkan laporan yang diuat oleh auditor eksternal. Auditor berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan. Kualitas auditor merupakan hal penting yang harus diperhatikan auditor dalam proses pengauditan.

Kualitas auditor berpengaruh terhadap pekerjaan audit dikarenakan auditor yang bereputasi dan spesialis dibidang industri merupakan indikator kualitas audit. Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas penilaian pasar akan kesalahan material yang ada pada laporan keuangan dapat dideteksi dan dilaporkan oleh auditor (DeAngelo, 1981). Auditor mampu mendeteksi resiko salah saji material dalam laporan keuangan dan bersedia melaporkannya berarti memiliki kualitas

audit yang baik. Kualitas audit ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor (DeAngelo, 1981). Auditor yang kompeten merupakan auditor yang dapat menemukan adanya pelanggaran, sedangkan auditor independen merupakan auditor yang bersedia melaporkan pelanggaran tersebut.

(Arens et al, (2014) menatakan bahwa pemahaman mengenai bisnis dan industri klien serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting agar dapat dilakukan audit yang memadai. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman lebih tentang resiko audit industri tersebut. Spesialisasi dalam industri tertentu menjadai sebuah *trend*, dan para penulis menemukan bahwa auditor dengan spesialisasi industri menghasilkan penghematan insial dan kualitas auditor (Hogan & Jeter, 1998).

Faktor utama yang mempengaruhi peran spesialisasi industri dalam meningkatkan kualitas laa adalah pengetahuan dan pengalaman auditor terkait bisnis klien. Auditor spesialisasi industri memperoleh pengetahuan lebih banyak dibanding *non* spesialisasi, khususnya mengenai industri tertentu. Perusahaan yang menggunakan auditor spesialis industri memiliki kualitas laba lebih tinggi (Gulung, dan Janggi, 2009). kajian ini menggunakan spesialisasi industri sebagai proksi kualitas audit. Pemilihan auditor spesialisais didasarkan pada bebrapa pertimbangan antara lain: (1) pengetahuan dan pengalaman auditor terkait bisnis klien, banyak industri memiliki ketentuan akuntansi

yang khas sehingga membutuhkan pengetahuan auditor, (2) pemahaman atas resiko industri, auditor harus mengidentifikasi resiko dalam industri tertentu karena mempengaruhi penerapan resiko audit; (3) resiko bawaan (*inherent risk*), terdapat resiko bawaan yang sama bagi seluruh klien dalam industri tersebut sehingga auditor spesialisasi industri akan lebih memahami.

B. Efektivitas Komite Audit dalam Corporate Governance

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Suardi, 2009). Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan perusahaan yang menyatakan seberapa jauh tujuan perusahaan yang dicapai. Sehingga penilaian efektivitas adalah pencapaian target sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi.

Lin et al, (2008) mendefinisikan efektivitas komite audit sebagai kinerja peran komite audit dalam meninjau informasi akuntansi perusahaan, pengawasan sistem audit internal dan hubungan dengan auditor eksternal. Efektivitas komite audit menggambarkan kemampuan komite audit dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari *corporate governance* yang dilakukan perusahaan. Semakin efektif komite audit dalam menjalankan perannya maka dianggap tujuan implementasi tercapai dengan baik

Komite audit yang efektif berkerja sebagai salah satu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggungjawab, keterbukaan dan ojektivitass dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk: (1) memperbaiki mutu laporan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris; (2) menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan; (3) memungkinkan anggota non-eksekuti menyumbangkan suatu penilaian independen dan

memainkan peranan yang positif; (4) memberikan direktur keuangan kesempatan dimana pokok-pokok persoalan yang penting dan sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI, 2002) memberikan rekomendasi bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Karakteristik komite audit berpengaruh pada peran-peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan setiap tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Bapepam memberikan syarat bagi anggota komite audit sesuai dengan keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 september 2004 sebagai berikut: (1) memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; (2) salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan; (3) memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan; (4) memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya; (5) bukan merupakan orang dari KAP, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan

selama enam bulan terakhir; (6) bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam enam bulan terakhir; (7) tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan; (8) tidak memiliki hubungan keluarga dengan perusahaan.

kajian Oussii & Boulila Taktak, (2018) menyatakan efektivitas komite audit di proxykan menjadi lima variabel. Keahlian komite audit diukur menggunakan proporsi komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi diantara total komite audit, independensi komite audit didefinisikan sebagai proporsi direktur non-eksekutif di antara jumlah total direktur, ukuran komite audit, didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit perusahaan, ketekunan komite audit didefinisikan sebagai jumlah rapat komite audit yang diadakan sepanjang tahun, komite audit yang mengadopsi piagam komite audit dinilai dengan variabel dummy.

kajian Bin-Ghanem & Ariff, (2016) mengukur efektivitas komite audit menggunakan skor kemudian dijumlahkan. Skor karakteristik komite audit dijumlahkan untuk menyusun ukuran gabungan spesifik perusahaan dapat dikatakan memiliki komite audit yang efektif. Pertama perusahaan memiliki jumlah komite audit diatas rata-rata dari sampel, kedua komite audit independen apabila proporsi anggota komite audit lebih tinggi dari rata-rata sampel, keahlian keuangan dalam komite audit sama atau lebih tinggi

dari rata-rata sampel, rapat komite audit diadakan setahun sama atau lebih tinggi dari rata-rata.

Kajian Ali et al, (2018) menyatakan bahwa komite audit dikatakan efektif apabila komite audit dalam menjalankan tugasnya dibawah dewan komisaris dipengaruhi oleh beberapa karakter independensi anggota, ketekunan anggota yang bertemu dalam rapat, kehadiran setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan dan ukuran komite audit. Pada kajiannya menggabungkan lima kombinasi karakteristik komite audit meliputi independensi anggota, ketekunan anggota yang bertemu dalam rapat, kehadiran setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan dan ukuran komite audit, Sistem skor digunakan dimana nilai dikotomi '1' atau '0' ditetapkan untuk setiap karakteristik komite audit yang efektif.

BAB 8

INTERAKSI KUALITAS AUDIT DAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA RILL

A. Peran Kualitas Audit dalam Moderasi Efektivitas Komite Audit

asumsi kedua menatakan bahwa kualitas audit memoderasi pengaruh efektivitas komite audit terhadap manajemen laba. Hasil uji statistik menyatakan bahwa variabel kualitas audit merupakan *quasi moderator* yang berarti variabel tersebut dapat menjadi variabel independen dan variabel moderasi. Kualitas audit memperkuat pengaruh efektivitas komite audit terhadap manajemen laba rill.

kajian ini membuktikan bahwa peran auditor dalam mekanisme *governance* menguatkan pengaruh efektivitas komite audit terhadap manajemen laba rill. Melalui interaksinya dengan komite audit yang efektif melakukan tugasnya terhadap manajemen laba. Hasil kajian ini mengonfirmasi konsep *bundle of governance*, bahwa dua mekanisme internal (efektivitas komite audit) dan mekanisme eksternal (kualitas audit) saling melengkapi dalam mekanisme monitoring terhadap manajemen laba.

Kualitas auditor terbukti memperkuat pengaruh positif efektivitas komite audit terhadap manajemen laba. Kualitas auditor dalam kajian ini diprosikan menggunakan auditor spesialisasi industri/ sub sektor industri. Hasil menunjukkan bahwa spesialisasi industri menggambarkan auditor yang berkualitas. Hasil kajian

terdahulu mendukung kesimpulan ini. Balsam et al (2003) menemukan bahwa spesialisasi auditor dibidang sub sektor industri berhubungan dengan kualitas audit. Auditor yang memiliki spesialisasi industri akan memberikan audit yang lebih berkualitas (Stein & Cadman, 2007). Auditor yang memiliki pengalaman dalam memeriksa satu jenis industri klien, memperoleh pelatihan teknis dan terus menerus mengembangkan keahliannya melalui pendidikan maupun pelatihan maka auditor akan semakin berkualitas.

B. Komite Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

Abbott & Parker, (2000) mengkaji hubungan antara frekuensi pertemuan komite audit dan spesialisasi industri auditor, jumlah rapat komite audit dikaitkan dengan peningkatan pilihan perusahaan audit dengan kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, komite audit yang lebih sering bertemu lebih cenderung menganggap spesialisasi industri sebagai keterampilan penting dalam auditor eksternal dan karenanya menunjuk auditor spesialis industri. (Knapp, 1987) berpendapat bahwa keahlian komite audit lebih mungkin untuk mendukung auditor dalam kasus perselisihan auditor-klien dari pada komite audit yang terdiri dari anggota dengan latar belakang lain.

(Piot & Janin, 2007) mengkaji fungsi penting komite audit dalam meningkatkan kualitas proses audit dan mengurangi praktik manajemen laba. Pertama, dengan mengontrol pilihan akuntansi dan proses pelaporan keuangan. Kedua, dengan

mengkoordinasikan audit internal dan eksternal dan, menjamin independensi dan kebebasan auditor eksternal dari tekanan manajerial (Mcmullen & Raghunandan, 1996). Akibatnya, komite audit dan kualitas auditor eksternal mampu membatasi manajemen laba oportunistik (J. W. Lin & Hwang, 2010). Auditor dapat membatasi manajemen laba tidak hanya melalui audit laporan keuangan tetapi melalui interksinya dengan mekanisme tata kelola internal (Sun & Liu, 2013)

Hubungan antara kualitas komite audit dengan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan dapat diperkuat dengan audit yang berkualitas oleh auditor eksternal. Komite audit dalam perusahaan dianggap sebagai mekanisme pemantauan yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan untuk pengawasan proses pelaporan keuangan perusahaan (Joshi & Wakil, 2004). Komite audit dalam menjalankan fungsi membantu dewan komisaris dalam menjaga kualitas laporan keuangan akan semakin baik dengan adanya auditor yang memiliki kualitas yang tinggi. Komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat menjadi penengah yang baik apabila ada perselisihan antara auditor dan perusahaan (Zgarni *et al.*, 2016). Sisi eksternal perusahaan terdapat auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang kompeten dan independen bertugas untuk menilai seberapa besar laporan keuangan perusahaan. Komite audit mewakili dewan komisaris untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit.

Efektivitas komite audit dalam penelitian meliputi komposisi komite audit, kinerja komite audit, dan akuntabilitas komite audit. Komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan dapat menurunkan manajemen laba (Bedard et al., 2004) dan diharapkan dapat memonitor pengendalian internal menjadi lebih baik (Krishnan, 2005). Independensi komite audit dapat mencegah terdapatnya isu salah saji pada laporan keuangan perusahaan (Tang & Shandy, 2021). Seringnya komite audit melakukan pertemuan akan melakukan fungsi pengawasan dengan baik (Khamoussi, 2016).

Efektivitas komite audit yang tertata dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Safari, 2017) dan mengurangi salah saji pada laporan keuangan melalui fungsi pengawasan. Komite audit memainkan peran penting dalam mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan. Komite audit secara aktif mengawasi dan memantau manajemen yang mempersiapkan laporan keuangan (Qamhan et al., 2018). Komite audit memainkan peran penting dalam menghambat tindakan oportunistik dan dapat meningkatkan pemantauan terhadap perusahaan sehingga dapat meminimalisir manajemen laba riil.

BAB 9

PENUTUP

Kesimpulan hasil kajian disajikan sebagai berikut:

Pertama, efektivitas komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan kajian, dan asumsi yang telah ditetapkan, hasil kajian menyimpulkan bahwa efektivitas komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba riil. Artinya, semakin efektif komite audit dalam suatu perusahaan, maka semakin mampu menurunkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Komite audit yang berfungsi secara optimal dapat memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap laporan keuangan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi angka yang dapat merugikan para pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang kompeten dan berpengalaman sangat penting dalam menjaga integritas laporan keuangan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki komite audit yang efektif akan lebih mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada investor dan stakeholder lainnya, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Kedua, kualitas audit memperkuat pengaruh efektivitas komite audit terhadap manajemen laba riil. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor memiliki peran penting dalam

memperkuat pengaruh positif efektivitas komite audit terhadap manajemen laba. Semakin tinggi kualitas auditor, semakin kuat pengaruh yang diberikan terhadap efektivitas komite audit dalam menurunkan manajemen laba. Auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman yang baik cenderung lebih mampu mendeteksi kesalahan dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan, serta memberikan masukan yang konstruktif kepada komite audit. Interaksi yang terjadi antara efektivitas komite audit dan kualitas audit meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Dengan kata lain, kolaborasi yang erat antara komite audit yang efektif dan auditor berkualitas dapat menciptakan sistem pengendalian yang lebih solid, yang pada gilirannya berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, hasil kajian ini menggarisbawahi pentingnya peran komite audit dan kualitas auditor dalam konteks corporate governance. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, di mana tantangan dan risiko terus berkembang, perusahaan perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada berfungsi dengan baik. Dengan memiliki komite audit yang efektif dan auditor yang berkualitas, perusahaan tidak hanya dapat melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya di pasar. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas komite audit dan peningkatan kualitas auditor menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

Selain itu, perusahaan harus memperhatikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi anggota komite audit dan auditor untuk memastikan bahwa mereka tetap up-to-date dengan praktik terbaik dan perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi industri mereka. Hal ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang risiko yang dihadapi perusahaan serta tren terkini dalam akuntansi dan audit. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan untuk menciptakan budaya yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap anggota tim merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan mengatasi isu-isu yang mungkin muncul.

Kesimpulan ini juga menekankan bahwa komite audit tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Komite audit yang efektif dapat membantu dewan komisaris dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik, dengan memberikan wawasan yang berharga tentang risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dalam hal ini, komite audit yang dilengkapi dengan anggota yang memiliki keahlian di berbagai bidang, termasuk keuangan, hukum, dan manajemen risiko, akan lebih mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih baik serta membangun sistem tata kelola yang efektif dan efisien. Penekanan pada efektivitas komite audit dan kualitas auditor tidak hanya relevan untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk usaha

kecil dan menengah yang ingin meningkatkan praktik tata kelola mereka. Keberhasilan dalam implementasi rekomendasi ini akan sangat bergantung pada komitmen manajemen dan dewan komisaris untuk mendukung inisiatif tersebut, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). Auditor selection and audit committee characteristics. *Auditing*, 19(2), 46-66. <https://doi.org/10.2308/aud.2000.19.2.47>
- Abdullah, S. N., & Ismail, K. N. I. K. (2016). Women directors, family ownership and earnings management in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 24(4), 525-550. <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2015-0067>
- Adiasih, P., & Kusuma, I. W. (2012). Manajemen Laba Pada Saat Pergantian CEO (Dirut) Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 67-79. <https://doi.org/10.9744/jak.13.2.67-79>
- Aguilera, R. V., Desender, K. A., & Kabbach de Castro, L. R. (2012). A Configurational Approach to Comparative Corporate Governance. *Working Paper Niversity of Illinois at Urbana-Champaign, College of Business*.
- Al-absy, M. S. M., Ismail, K. N. I. K., & Chandren, S. (2018). Accounting expertise in the audit committee and earnings management. *Business and Economic Horizons*. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.33>
- Al-Thuneibat, A. A., Al-Angari, H. A., & Alsad, S. A. (2016). The effect of corporate governance mechanisms on earnings management: evidence from Saudi Arabia. *Review of International Business and Strategy*, 26(1). [file:///F:/ARTICULOS/wang2018\(2\).pdf](file:///F:/ARTICULOS/wang2018(2).pdf)
- Ali, M. J., Singh, R. K. S., & Al-akra, M. (2018). The impact

- of audit committee effectiveness on audit fees and non-audit service fees: evidence from Australia. *Accounting Research Journal*, 31(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2015-0144>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014a). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. pearson.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014b). *Auditing and assurance services (15 edition ed.)*. pearson education Inc.
- Arun, T. G., Almahrog, Y. E., & Aribi, Z. (2015). Female directors and earnings management: Evidence from UK companies. *International Review of Financial Analysis*, 39, 137-146. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.03.002>
- Badolato, P. G., Donelson, D. C., & Ege, M. (2014). Audit committee financial expertise and earnings management: The role of status. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2-3), 208-230. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.08.006>
- Balsam, S., Krishnan, J., & Yang, J. (2003). Auditor Industry Specialization and Earnings Quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory. *Journal of Practice & Theory*, 22(2), 71-97.
- Bédard, J., Chtourou, S. M., & Courteau, L. (2004). The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management. *Auditing*, 23(2), 13-35. <https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.2.13>

- Bédard, J., & Gendron, Y. (2011). Strengthening the Financial Reporting System: Can Audit Committees Deliver? *SSRN Electronic Journal*, 6(418), 1-66. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1438150>
- Berger, P. G., Minnis, M., & Sutherland, A. (2017). Commercial lending concentration and bank expertise: Evidence from borrower financial statements. *Journal of Accounting and Economics*, 64(2-3), 253-277. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.06.005>
- Bin-Ghanem, H., & Ariff, A. M. (2016). The effect of board of directors and audit committee effectiveness on internet financial reporting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 429-448. <https://doi.org/10.1108/jaee-07-2014-0037>
- Bliss, M. A., Gul, F. A., & Majid, A. (2011). Do political connections affect the role of independent audit committees and CEO Duality? Some evidence from Malaysian audit pricing. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 7(2), 82-98. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2011.10.002>
- Braam, G., Nandy, M., Weitzel, U., & Lodh, S. (2015). Accrual-based and real earnings management and political connections. *International Journal of Accounting*, 50(2), 111-141. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.10.009>
- Carcello, J. V., Hollingsworth, C. W., Klein, A., & Neal, T. L. (2006). Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management. *SSRN Electronic Journal*,

- February. <https://doi.org/10.2139/ssrn.887512>
- Carcello, J. V., & Nagy, A. L. (2004). Client size, auditor specialization and fraudulent financial reporting. *Managerial Auditing Journal*, 19(5), 651–668. <https://doi.org/10.1108/02686900410537775>
- Chi, W., Lisic, ling lei, & Pevzner, M. (2011). Is Enhanced Audit Quality Associated with Greater Real Earnings Management? *Journal of International Accounting Research*, 90(4), 1395–1435.
- Choi, J. (2004). *The role of audit committees in decreasing earnings management: Korean evidence Kyu-An Jeon Jong-Il Park*. 1(1), 37–60.
- Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). 12.Cohen Dey Lys_AR 2008.pdf. 83(3), 757–787.
- Cohen, D. A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. *Journal of Accounting and Economics*, 50(1), 2–19. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.01.002>
- Deangelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. 3(July), 183–199.
- Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). International Corporate Governance. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 1. <https://doi.org/10.2307/4126762>
- Dhaliwal, D., Naiker, V., & Navissi, F. (2010). The association between accruals quality and the characteristics of accounting experts and mix of expertise on audit committees. *Contemporary Accounting Research*, 27(3), 787–827.

- <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01027.x>
- Dwiadnyana, I. K. A., & Jati, I. K. (2014). Reaksi pasar atas manajemen laba pada pengumuman informasi laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(1), 165-176.
- Gendron, Y., & Bédard, J. (2006). On the constitution of audit committee effectiveness. *Accounting, Organizations and Society*, 31(3), 211-239. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2005.03.002>
- Goodwin dan Kent. (2006). The relation between external audit fees, internal audit and the audit committee. *Accounting and Finance*, 46(13), 387-404.
- Gore, A. K., Matsunaga, S., & Eric Yeung, P. (2010). The role of technical expertise in firm governance structure: evidence from chief financial officer contractual incentives. *Strategic Management Journal*, 32(7), 781-786. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.907>
- Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 40(1-3), 3-73. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002>
- Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7(1-3), 85-107. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(85\)90029-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(85)90029-1)
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting. *SSRN Electronic Journal*, 36.
- Hogan, C. E., & Jeter, D. (1998). Industry Specialization by

- Auditors. *Auditing A Journal of Practice & Theory*, 18(1). <https://doi.org/10.2308/aud.1999.18.1.1>
- Imen, F., & Anis, J. (2021). The moderating role of audit quality on the relationship between auditor reporting and earnings management: empirical evidence from Tunisia. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 416–430. <https://doi.org/10.1108/EMJB-03-2020-0024>
- Jaggi, B., Leung, S., & Gul, F. (2009). Family control, board independence and earnings management: Evidence based on Hong Kong firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 28(4), 281–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.002>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Joshi, P. L., & Wakil, A. (2004). A study of the audit committees' functioning in Bahrain: Empirical findings. *Managerial Auditing Journal*, 19(7), 832–858. <https://doi.org/10.1108/02686900410549394>
- Knapp, M. C. (1987). An empirical study of audit committee support for auditors involved in technical disputes with client management. *The Accounting Review*, 62(3), 578.
- Kumaran Bisnis. (2019). *Fakta-fakta skandal laporan keuangan garuda*.
- Kurniasih, Shadu S. Wijaya, & Paulus Israwan Setyoko. (2021). Public Governance in Accountability of Village Enterprise (BUMDes) Management: a Stakeholders Perspective. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(2), 1–16.

- <https://doi.org/10.37304/jispar.v7i2.967>
- Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. *Journal of Financial Economics*, 69(3), 505–527. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(03\)00121-1](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00121-1)
- Lin, J. W., & Hwang, M. I. (2010). Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis. *International Journal of Auditing*, 14(1), 57–77. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2009.00403.x>
- Lin, Z. J., Xiao, J. Z., & Tang, Q. (2008). The roles, responsibilities and characteristics of audit committee in China. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(5), 721–751. <https://doi.org/10.1108/09513570810872987>
- Lukviarman, N. (2001). Key characteristics of corporate governance: The case of Indonesia. *Curtin Graduate School of Business Working Paper*.
- Mcmullen, dorothy A., & Raghunandan, K. (1996). Enhancing Audit Committee Effectiveness. *Journal of Accountancy*.
- Meixner, W. F. and Welker, R. B. (1988). Judgment Consensus and Auditor Experience: An Examination of Organizational Relations. *Source: The Accounting Review*, 63(3), 505–513.
- Mizruchi, M. S. (2004). Berle and Means Revisited: The Governance and Power of Large U.S. Corporations. *Theory and Society*, 33(5), 579–617.
- Moroney, R., & Trotman, K. T. (2016). Differences in

- Auditors' Materiality Assessments When Auditing Financial Statements and Sustainability Reports. *Contemporary Accounting Research*, 33(2), 551-575. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12162>
- Nasution, D., & Jonnergard, K. (2017). Do auditor and CFO gender matter to earnings quality? Evidence from Sweden. *Gender in Management: An International Journal*.
- Neil, Jhon D., Pourciau, S. G., & Schaefer, T. F. (1995). accounting Method Choice and IPO Valuation. *Accounting Horizons*, 9(3), 68-80.
- Nelson, S. P., & Devi, S. (2013). Audit committee experts and earnings quality. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 13(4), 335-351. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2011-0009>
- Okrorina, M., & Hutagaol, Y. (2009). Analisis Arus Kas Kegiatan Operasi dalam Mendeteksi Manipulasi Aktivitas Riil dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pasar. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 12(1).
- Osma, B. G. (2008). Board independence and real earnings management: The case of R&D expenditure. *Corporate Governance: An International Review*, 16(2), 116-131. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00672.x>
- Oussii, A. A., & Boulila Taktak, N. (2018). Audit committee effectiveness and financial reporting timeliness: The case of Tunisian listed companies. *African Journal of Economic and Management Studies*, 9(1), 34-55. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-11-2016-0163>
- Parfet, W. U. (2000). Accounting Subjectivity and Earnings

- Management: A Preparer Perspective. *American Accounting Association*, 14(4), 481–488.
- Piot, C., & Janin, R. (2007). External auditors, audit committees and earnings management in France. *European Accounting Review*, 16(2), 429–454. <https://doi.org/10.1080/09638180701391030>
- Qamhan, M. A., Che Haat, M. H., Hashim, H. A., & Salleh, Z. (2018). Earnings management: do attendance and changes of audit committee members matter? *Managerial Auditing Journal*, 33(8–9), 760–778. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1560>
- Rediker, K. J., & Seth, A. (1995). Boards of Directors and Substitution Effects of Alternative Governance Mechanisms. *Strategic Management Journal*, 16(2), 85–99.
- Roychowdhury, S. (2003). Earnings Management Through Real Activities Manipulation. *SSRN Electronic Journal*, 54.
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002>
- Rusmin. (2010). *Auditor Quality and Discretionary Accruals : Case of Australian Listed Companies*. 14(1), 1–28.
- Safari, M. (2017). Board and audit committee effectiveness in the Post- ASX Corporate Governance Principles and Recommendations era. *Managerial Finance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MF-07-2015-0185>
- Salehi, M., Tahervafaei, M., & Tarighi, H. (2018). The effect

of characteristics of audit committee and board on corporate profitability in Iran. . . *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 34(1), 71–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JEAS-04-2017-0017>

Scott, W. R. (2012). *Financial accounting theory*. Prentice Hall.

Sharma, S., Durand, M., R., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*, 18, 291–300.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, LII(2), 737–783.

Stein, M. T., & Cadman, B. D. (2007). Industry Specialization and Auditor Quality in U.S. Markets. *SSRN Electronic Journal*, 60208(July). <https://doi.org/10.2139/ssrn.722203>

Sun, J., Lan, G., & Liu, G. (2014). Independent audit committee characteristics and real earnings management. *Managerial Auditing Journal*, 29(2), 153–172. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2013-0865>

Sun, J., & Liu, G. (2013). Auditor industry specialization, board governance, and earnings management. *Managerial Auditing Journal*, 28(1), 45–64. <https://doi.org/10.1108/02686901311282498>

Sun, J., Liu, G., & Lan, G. (2011). Does Female Directorship on Independent Audit Committees Constrain Earnings Management? *Journal of Business Ethics*, 99(3), 369–382. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0657-0>

Vafeas, N., & Waagelein, J. F. (2007). The association

- between audit committees , compensation incentives , and corporate audit fees. *Rev Quant Finan Acc*, 241–255. <https://doi.org/10.1007/s11156-006-0012-9>
- Veronica, S., & Bachtiar, Y. S. (2005). Corporate governance, information asymmetry, and earning management. *Corporate Governance, Information Asymmetry, and Earnings Management, vol.2*, 77–106.
- Wan Mohammad, W. M., & Wasiuzzaman, S. (2020). Effect of audit committee independence, board ethnicity and family ownership on earnings management in Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(1), 74–99. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2019-0001>
- Ward, A. J., Brown, J. A., & Rodriguez, D. (2009). Governance bundles, firm performance, and the substitutability and complementarity of governance mechanisms. *Corporate Governance: An International Review*, 17(5), 646–660. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00766.x>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.
- Zalata, A. M., Tauringana, V., & Tingbani, I. (2018). Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert matter? *International Review of Financial Analysis*, 55(March 2017), 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.11.002>
- Zaman, M., Hudaib, M., & Haniffa, R. (2011). Corporate governance quality, audit fees and non-audit services fees. *Journal of Business Finance and Accounting*, 38(1–

2), 165–197. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2010.02224.x>

Zgarni, I., Hlioui, K., & Zehri, F. (2016). Effective audit committee, audit quality and earnings management. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(2), 138–155. <https://doi.org/10.1108/jaee-09-2013-0048>

Zhou, J., & Elder, R. (2004). Audit quality and earnings management by seasoned equity offering firms. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 11(2), 95–120.
<https://doi.org/10.1080/16081625.2004.10510638>